

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi, Rianto, 2015, *Aspek Hukum Dalam Penelitian*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anggoro, Damas Dwi, 2017, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.
- Atok, A.Rosyid Al, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press.
- Bratakusumah, Deddy Supriyady dan Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Firdausy, Carunia Mulya, 2017, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional, Ed*, Jakarta :Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- HR, Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Jhony, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Marihot P Sihan, 2005, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Nugroho, Setio Sapto , 2009, “*Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas.

Sabarno, Hari, 2007, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika

Sidik, Machfud, 2002, *Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori Dan Aplikasinya Di Indonesia)*, Yogyakarta: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI.

Ubaidillah, Dkk, 2000, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center For Civic Education.

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Makassar: CV Sosial Politic Genius.

## **B. Peraturan Perundang- Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan  
Daerah

### **C. Kamus, Skripsi , Tesis, Disertasi**

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Isfahani, Shifa, 2021, *Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rochineng, I Ketut, 2017, *Kewenangan Pengaturan Retribusi Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali*, Disertasi Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Wulandari, Rihari, 2012, *Perubahan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Dengan Peraturan Kepala Daerah Sebagai Amanat Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Tesis Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### **D. Jurnal**

- Busroh, Firman Freaddy, 2017, *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Jurnal Arena Hukum Vol. 10 No. 2.
- Gandara, Moh, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat*, Jurnal *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3.
- Gomies, Stevanus J dan Victor Pattiasina, 2011, *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*. Jurnal Ilmiah Aset Vol 13 No 2
- Hantoro, Novianto Murti, 2020, *Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*, Parliamentary Review, Vol 2, No 1.
- Horota, Parson, Ida Ayu Purba Riani, dan Robert M. Marbun. 2017, *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 2 No1.
- Hsb, Ali Marwan dan Evlyn Martha Julianthy, 2018, *Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No 2.
- Iqbal, Muhammad, 2016, *Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Supremasi, Vol. 11 No. 2.
- Kurniadi, Bayu Dardias, 2012, *Desentralisasi Asimetris di Indonesia*. Seminar LAN Jatinangor, Vol. 26, No 1.

- Nasir, Muhammad Safar, 2019, *Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah.*" Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Vol. 2 No. 1.
- Nopyandri, 2015, *Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 1.
- Nugraha, 2004. "*Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi).*" Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi, Vol. 2 No. 4.
- Oktavina, Dewi, 2012, *Analisis PAD dan Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Otonomi Daerah: Pendekatan Error Correction Model,* Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10, No.2.
- Pranata, Gede, I Gusti Ayu Purnamawati dan I Made Pradana Adiputra, 2015, *Pengaruh Tarif Pajak Dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Pt. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Periode 2001-2014).*" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha, Vol. 3 No 1.
- Putri, Indah Astrida Lestari, Nurul Satria Abdi, 2021, *Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia,* Ahmad Dahlan Legal Perspective Vol. 1 No. 1.
- Santoso, Hari Agus, 2021, *Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi,* Jurnal Hukum Positum Vol.6, No.2.
- Suntoro, Agus, Komnas HAM, 2021, *Implementasi Pencapaian Secara Progresif dalam Omnibus Law Cipta Kerja,* Jurnal Ham, Vol. 12 No. 1.

Sufriadi, 2014, *Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No.

1.

Wijayanti, Septi Nur, 2016, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*, Vol 23, No.2.

